**ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN KINERJA KEUANGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Sonya Nopiyanti1, Eri Triharyati2, Martini3**

1,2,3Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

Email : 1218020043@ mhs.univbinainsan.ac.id, [23triharyati@gmail.com](mailto:23triharyati@gmail.com),[3martinidhasman@univbinainsan.ac.id](mailto:3martinidhasman@univbinainsan.ac.id)

**Abstrak**

Anggaran adalah rencana kegiatan kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan yang disusun secara otomatis berdasarkan program yang telah disahkan untuk masa yang akan datang (Djemma, 2021). Pada tahun 2020, Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di berbagai sektor. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu institusi yang terdampak akibat pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa program atau kegiatan yang tidak bisa terlaksana dengan baik dan menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi biaya operasional di dinas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi biaya operasional sebagai alat pengendalian kinerja keuangan pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang bersifat menguntungkan (*favorable variance*) atau tidak menguntungkan (*unfavorable variance*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varians dan analisis perbandingan sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan sumber data berupa laporan anggaran dan realisasi biaya operasional yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengendalian anggaran dan ralisasi biaya operasional pada masa pandemi dan sesudah Covid-19 dan penyimpangan yang terjadi di dinas tersebut bersifat penyimpangan yang menguntungkan (*favorable variance).*

**Kata Kunci :** Anggaran, Realisasi, Biaya Operasional, Pengendalian Kinerja Keuangan

***Abstract***

*A budget is a plan of work activities as outlined in financial figures that are compiled automatically based on an approved program for the future (Djemma, 2021). In 2020, Indonesia experienced the Covid-19 Pandemic which caused an economic crisis in various sectors. The Musi Rawas Regency Environmental Service is one of the institutions affected by the Covid-19 pandemic, so there are several programs or activities that cannot be carried out properly and cause a discrepancy between the budget and the realization of operational costs at the agency. This study aims to determine whether there is a difference between the budget and the realization of operational costs as a means of controlling financial performance in the period before and during the Covid-19 pandemic and to find out whether there are favorable variances or unfavorable variances. This type of research is descriptive quantitative. The method used in this study is analysis of variance and comparative analysis before and during the Covid-19 pandemic with data sources in the form of budget reports and realization of operational costs obtained from the Musi Rawas Regency Environmental Service. The test results show that there are differences in budget control and operational cost realization during the pandemic and after Covid-19 and the deviations that occur in the agency are favorable variances.*

****

***Keywords****: Budget, Realization, Operational Cost, Financial Performance Control*

1. **Pendahuluan**

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dikejutkan oleh sebuah kasus yang berasal dari Kota Wuhan, China yang teridentifikasi sebagai sebuah penyakit yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di awal tahun 2020, penyebaran virus Covid-19 mencapai ribuan orang dan mulai menyebar ke negara-negara di luar China termasuk Indonesia. Disebabkan kasus positif yang terus bertambah, banyak negara yang mulai melakukan kebijakan dan langkah-langkah antisipasi seperti menutup akses transportasi dari negara lain, melarang adanya perkumpulan dan melakukan *Lockdown* selama pandemi (Onibala et al., 2021).

Upaya pencegahan Covid-19 tersebut berpengaruh pada aktivitas bisnis yang berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara, meningkatkan jumlah kemiskinan dan bertambahnya jumlah pengangguran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada bulan Februari 2020 dari 4,99 persen menjadi 6,17 persen, pada bulan Maret 2020 meningkat sebesar 6,65 persen dan pada bulan Agustus 2020 meningkat sebesar 7,07 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan di Sumatera Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Februari 2020 sebesar 3,86 persen dan pada bulan Agustus 2020 mencapai 5,05 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk menangani Pandemi Covid-19. Perppu tersebut secara garis besar membahas tentang dua hal, yang *pertama* kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. *Kedua*, Kebijakan Stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Yang kemudian disusul dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah (Basri & Gusnardi, 2021).

Anggaran yang dibuat pemerintah terdiri atas beberapa jenis anggaran, salah satunya adalah anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah, sehingga penyusunan anggaran dengan baik sangat penting untuk melihat sejauh mana anggaran operasional dan realisasinya. Adanya laporan anggaran dan realisasi biaya operasional, dapat diketahui apakah terdapat penyimpangan yang terjadi, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan (Haryati & Anggreani, 2019).

Pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas, terutama pada masa pandemi Covid-19, terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasinya tidak dapat dihindarkan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui selisih dari anggaran tersebut apakah masih dalam pengendalian atau tidak agar bila terdapat penyimpangan bisa segera diperbaiki. Berikut adalah laporan realisasi anggaran operasional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 – 2021 :

**Tabel 1.1 Laporan Anggaran Biaya Operasional dan Realisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 (dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Persentase |
| 1 | Biaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.024.318.000 | 1.021.722.700 | 99,75% |
| 2 | Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.303.625.800 | 1.198.120.000 | 91,91% |
| 3 | Biaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 75.000.000 | 70.500.000 | 94,00% |
| 4 | Biaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 75.896.121 | 75.585.900 | 99,61% |
| 5 | Biaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah | 1.948.427.414 | 1.857.800.000 | 96,17% |
| 6 | Biaya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2.171.884.665 | 2.026.775.677 | 93,32% |
| 7 | Biaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 854.833.000 | 795.485.500 | 92,08% |
| 8 | Biaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 250.935.000 | 235.500.000 | 93,93% |
| 9 | Biaya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 158.200.000 | 145.350.000 | 91,88% |
|  | **Jumlah** | **7.863.120.000** | **7.426.839.777** | **94,45%** |

Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

**Tabel 1.2 Laporan Anggaran Biaya Operasional dan Realisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Persentase |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 748.668.361 | 685.269.199 | 91,53% |
| 2 | Biaya Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 645.081.200 | 613.224.550 | 95,06% |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 32.475.000 | 25.500.000 | 78,52% |
| 4 | Biaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.472.000 | 11.500.000 | 79,46% |
| 5 | Biaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 27.781.300 | 25.180.500 | 90,64% |
| 6 | Biaya Program Pengembangan Pengelolaan Kinerja Persampahan | 504.617.000 | 449.963.400 | 89,17% |
| 7 | Biaya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1.139.344.999 | 1.054.695.875 | 92,57% |
| 8 | Biaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 179.225.200 | 166.641.830 | 92,98% |
| 9 | Biaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 162.647.300 | 145.100.000 | 89,21% |
| 10 | Biaya Program Perencanaan dan Pengelolaan Hutan | 88.200.000 | 81.600.000 | 92,52% |
| 11 | Biaya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 192.976.000 | 178.000.000 | 92,24% |
|  | **Jumlah** | **3.735.488.360** | **3.436.675.354** | **92.00%** |

Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

**Tabel 1.3 Laporan Anggaran Biaya Operasional dan Realisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Persentase |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 571.140.000 | 504.929.799 | 88,41% |
| 2 | Biaya Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 245.081.200 | 246.989.550 | 100,17% |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 32.475.000 | 29.500.000 | 93,92% |
| 4 | Biaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.472.000 | 14.472.000 | 100% |
| 5 | Biaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 27.781.300 | 27.180.500 | 97,84% |
| 6 | Biaya Program Pengembangan Pengelolaan Kinerja Persampahan | 504.617.000 | 465.500.000 | 92,52% |
| 7 | Biaya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 881.543.599 | 782.523.550 | 88,82% |
| 8 | Biaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 179.225.200 | 174.241.830 | 97,22% |
| 9 | Biaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 134.647.300 | 128.600.000 | 95,51% |
| 10 | Biaya Program Perencanaan dan Pengelolaan Hutan | 62.200.000 | 58.900.000 | 94,69% |
| 11 | Biaya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 100.976.000 | 98.500.000 | 97,55% |
|  | **Jumlah** | **2.754.158.599** | **2.531.337.229** | **91,91%** |

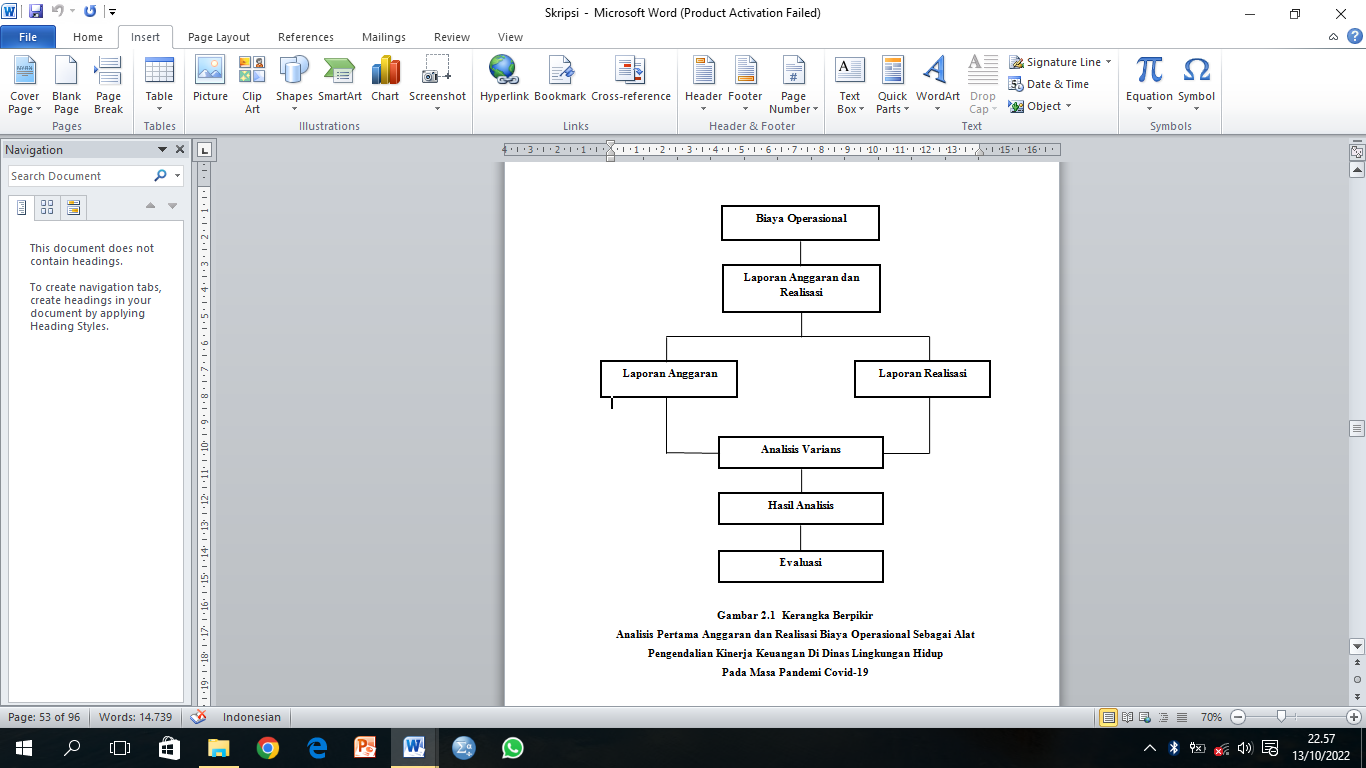
Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

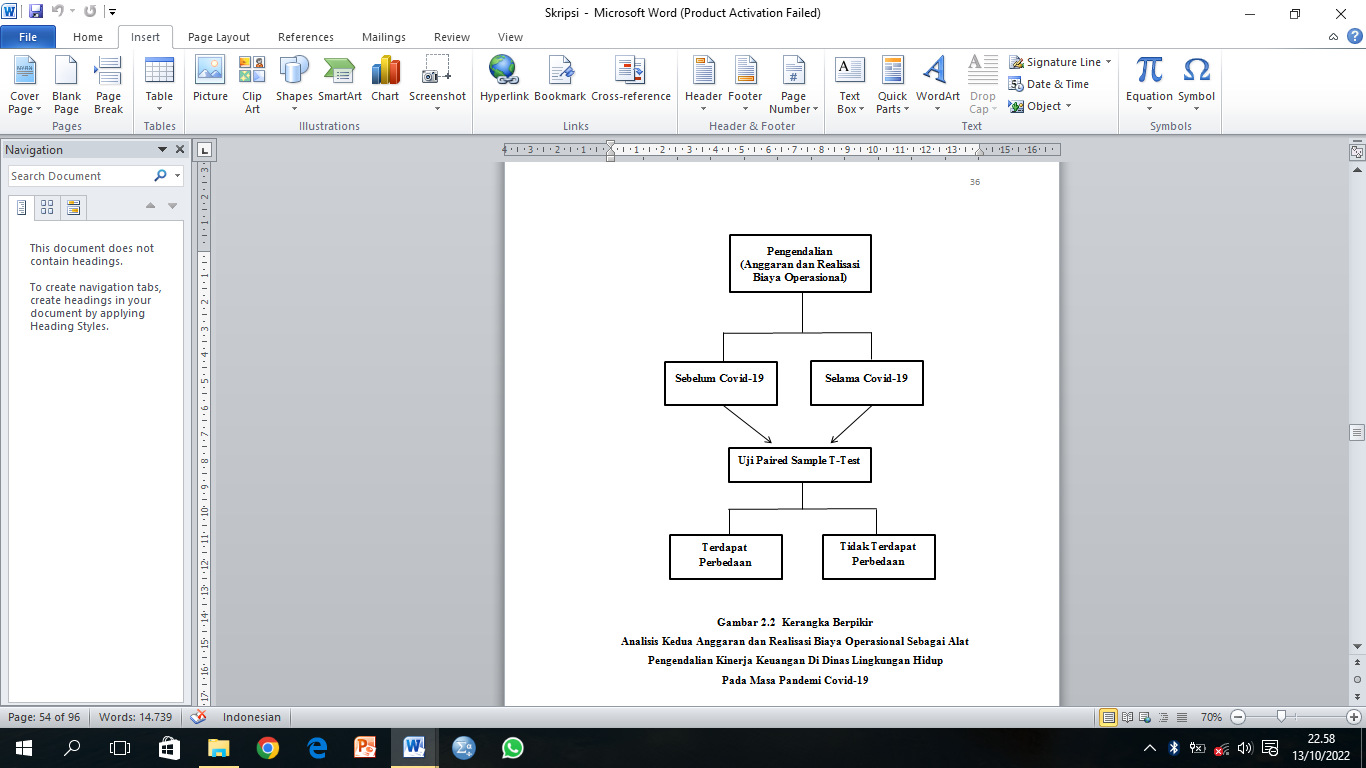
Penelitian yang berkaitan seperti yang dilakukan oleh (Suhaedi, 2019), (Wirataruna, 2021), (Ratnasari & Munawaroh, 2019) yang menganalisis anggaran dan realisasi biaya operasional dengan analisis varians. Hasil penelitian menunjukkan selisih anggaran dan realisasi dikategorikan selisih disukai (*Favourable variance*) karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Penelitian yang berkaitan seperti yang dilakukan oleh (Putra, 2021) dan (Purwanto et al., 2022), hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penyerapan anggaran dan capaian kinerja anggaran sebelum dan selama pandemi covid-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya menganalisis selisih anggaran dan realisasinya saja tetapi juga menganalisis anggaran dan realisasi sebagai alat pengendalian kinerja keuangan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan sebelum masa pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19.

**II. Metodologi Penelitian**

**2.1 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan dua kerangka berpikir karena adanya perbedaan analisis data. Analisis pertama menggunakan biaya operasional dengan melihat anggaran dan realisasi yang di analisis menggunakan analisis varians. Analisis kedua melihat pengendalian terhadap biaya operasional dengan menggunakan uji beda. Perbedaan penelitian ini digambarkan dengan dua kerangka pemikiran yang dijelaskan masing-masing berikut ini :

 Gambar 1.Kerangka Pemikiran Analisis Varians

Gambar 2.Kerangka pemikiran Uji Beda

* 1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah digambarkan, untuk penelitian yang menggunakan analisis varians tidak menggunakan hipotesis karena berupa analisis deskriptif, sedangkan penelitian yang menggunakan uji beda untuk melihat pengendalian menggunakan hipotesis sebagai berikut :

Ha : Terdapat perbedaan pengendalian terhadap anggaran dan realisasi biaya operasional sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

Ho : Tidak terdapat perbedaan pengendalian terhadap anggaran dan realisasi biaya operasional sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas

* 1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas yang ada di Kabupaten Musi Rawas tepatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas dengan alamat Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Daerah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Beliti dari bulan Januari 2022 sampai bulan September 2022.

* 1. **Desain Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang analisis anggaran dan realisasi biaya operasional sebagai alat pengendalian kinerja keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

* 1. **Definisi Operasional Variabel**

Anggaran biaya operasional adalah Anggaran atau taksiran semua biaya kegiatan operasional yang dikeluarkan dalam masa satu tahun buku (Yulisniawati, 2018). Periode waktu pada penelitian ini yaitu tahun 2019 sebagai indikator sebelum adanya pandemi covid-19 sedangkan tahun 2020 dan 2021 sebagai indikator setelah adanya pandemi covid-19.

* 1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah data anggaran dan data realisasi biaya operasional yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Sampel dalam penelitian ini adalah data anggaran dan data realisasi biaya operasional yang diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 3 tahun.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil data secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas berupa laporan anggaran dan realisasinya tahun 2019-2021.

* 1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, analisis varians dan uji *Paired Sample T-Test*. Uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* sedangkan uji reliablitas menggunakan *Cronbach’s Alpha*. Analisis selanjutnya adalah uji normalitas untuk mengetahui penyebaran data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima atau data berdistribusi normal dan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak atau data tidak berdistribusi normal (Arifin, 2017, p. 132).

Analisis selanjutnya adalah analisis varians. Analisis varians dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi yang terjadi. Selisih anggaran (varians) bersifat *favorable* dan *unfavorable*. Apabila realisasi lebih kecil dari anggaran maka disebut varians yang menguntungkan (*favorable variance*), atau apabila realisasi yang lebih besar dari anggaran maka disebut varians yang tidak menguntungkan (*unfavorable variance*). Menurut (Intihanah et al., 2021), rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan varians adalah :

Varians = Total Anggaran – Total Realisasi

Persentase Varians = x 100%

Pengujian selanjutnya yaitu uji Paired Sample T-Test. Uji paired sample t-test dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi biaya operasional sebagai alat pengendalian kinerja keuangan pada masa sebelum dan selama pandemi covid-19 di Indonesia.

**III. Hasil dan Pembahasan**

**3.1 Hasil Penelitian**

**1. Uji Validitas**

Berdasarkan uji validitas dengan Pearson Product Moment berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan :

**Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nilai R Hitung/ CITC** | **Keterangan** |
| Anggaran\_2019 | .686 | Valid |
| Realisasi\_2019 | .699 | Valid |
| Anggaran\_2020 | .674 | Valid |
| Realisasi\_2020 | .676 | Valid |
| Anggaran\_2021 | .700 | Valid |
| Realisasi\_2021 | .719 | Valid |

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Hasil pengujian validitas pada tabel 3.1, menunjukkan bahwa variabel anggaran dan realisasi selama 3 tahun, semua variabel tersebut berada di atas nilai r-tabel = 0,602 pada taraf signifikasi 5%, artinya jika nilai pada r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel, maka variabel tersebut dinyatakan valid sehingga layak digunakan untuk pengujian analisis selanjutnya.

**2. Hasil Uji Reliabilitas**

Berdasarkan uji validitas dengan *Cronbach’a Alpha* berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan :

**Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reliability Statistics** | | |
| **Cronbach's Alpha** | **N of Items** | **Keterangan** |
| .832 | 6 | Reliabel |

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 3.2, menunjukkan bahwa nilai *Alpha* berada di atas nilai konstanta yang di persyaratkan yaitu 0,6. Artinya nilai Alpha 0,832 > 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, sehingga dapat digunakan untuk alat ukur pada analisis selanjutnya.

**3. Hasil Uji Normalitas**

Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil pengujian normalitas menggunakan uji *Wilcoxon* *Signed Rank Test* adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wilcoxon Signed Ranks Test** | | |
| **Statistic** | **Z** | **Asymp. Sig. (2-tailed)** |
| AnggaranSelamaPandemi-SebelumPandemi | -1.836b | 0,066 |
| RealisasiSelamaPandemi-SebelumPandemi | -1.955b | 0,051 |

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 3.3, hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) untuk variabel diatas adalah 0,066 dan 0,051 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini membutikan bahwa variabel yang diteliti berdistribusi normal.

**4. Hasil Analisis Varians**

Berikut hasil perhitungan persentase varians untuk anggaran dan realisasi biaya operasional dari tahun 2019-2021 :

**Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Persentase Varians Tahun 2019 (dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program/  Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Varians | Persentase |
| 1 | Biaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.024.318.000 | 1.021.722.700 | 2.595.300 | 0,26% |
| 2 | Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.303.625.800 | 1.198.120.000 | 105.505.800 | 8% |
| 3 | Biaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 75.000.000 | 70.500.000 | 4.500.000 | 6% |
| 4 | Biaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 75.896.121 | 75.585.900 | 310.221 | 0,41% |
| 5 | Biaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah | 1.948.427.414 | 1.857.800.000 | 90.627.414 | 4,70% |
| 6 | Biaya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 2.171.884.665 | 2.026.775.677 | 145.108.988 | 6,69% |
| 7 | Biaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 854.833.000 | 795.485.500 | 59.347.500 | 7% |
| 8 | Biaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 250.935.000 | 235.500.000 | 15.435.000 | 6,15% |
| 9 | Biaya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 158.200.000 | 145.350.000 | 12.850.000 | 8,12% |
|  | **Jumlah** | **7.863.120.000** | **7.426.839.777** | **436.280.223** | **5,54%** |

Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

Dari tabel 3.4, dapat dilihat bahwa varians atau selisih biaya operasional yaitu biaya program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebesar Rp2.595.300,- biaya program peningkatan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp105.505.800,- biaya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebesar Rp4.500.000,- biaya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp310.221,- biaya program pengembangan kinerja pengelolaan sampah adalah sebesar Rp90.627.414,- biaya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah sebesar Rp145.108.988,- biaya program perlindungan dan konservasi sumber daya alam adalah sebesar Rp59.347.500,- biaya program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan adalah sebesar Rp15.435.000,- dan biaya program pengelolaan ruang terbuka hijau adalah sebesar Rp12.850.000,-.

**Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Persentase Varians Tahun 2020 (dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Varians | Persentase |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 748.668.361 | 685.269.199 | 63.399.162 | 8,47% |
| 2 | Biaya Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 645.081.200 | 613.224.550 | 31.856.650 | 4,94% |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 32.475.000 | 25.500.000 | 6.975.000 | 21,50% |
| 4 | Biaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.472.000 | 11.500.000 | 2.972.000 | 21% |
| 5 | Biaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 27.781.300 | 25.180.500 | 2.600.800 | 9,36% |
| 6 | Biaya Program Pengembangan Pengelolaan Kinerja Persampahan | 504.617.000 | 449.963.400 | 54.653.600 | 11% |
| 7 | Biaya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1.139.344.999 | 1.054.695.875 | 84.649.124 | 0,74% |
| 8 | Biaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 179.225.200 | 166.641.830 | 12.583.370 | 7,02% |
| 9 | Biaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 162.647.300 | 145.100.000 | 17.547.300 | 8,94% |
| 10 | Biaya Program Perencanaan dan Pengelolaan Hutan | 88.200.000 | 81.600.000 | 6.600.000 | 7,48% |
| 11 | Biaya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 192.976.000 | 178.000.000 | 14.976.000 | 7,76% |
|  | **Jumlah** | **3.735.488.360** | **3.436.675.354** | **298.813.006** | **8%** |

Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

Dari tabel 3.5, dapat dilihat bahwa varians atau selisih biaya operasional yaitu program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebesar Rp63.399.162,- biaya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar Rp31.856.650,- program peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar Rp6.975.000,- biaya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebesar Rp2.972.000,- biaya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp2.600.800,- biaya program pengembangan pengelolaan kinerja persampahan adalah sebesar Rp54.653.600,- biaya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah sebesar Rp84.649.124,- biaya program perlindungan dan konservasi sumber daya alam adalah sebesar Rp12.583.370,- biaya program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebesar Rp17.547.300,- biaya program perencanaan dan pengelolaan hutan adalah sebesar Rp6.600.000,- dan biaya program pengelolaan ruang terbuka hijau adalah sebesar Rp14.976.000,-.

**Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Persentase Varians Tahun 2021 (dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Program/  Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Selisih | Persentase |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 571.140.000 | 504.929.799 | 66.210.201 | 12% |
| 2 | Biaya Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 245.081.200 | 246.989.550 | (908.350) | -0,37% |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 32.475.000 | 29.500.000 | 1.975.000 | 6,08% |
| 4 | Biaya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 14.472.000 | 14.472.000 | - | 0 |
| 5 | Biaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 27.781.300 | 27.180.500 | 600.800 | 2,16% |
| 6 | Biaya Program Pengembangan Pengelolaan Kinerja Persampahan | 504.617.000 | 465.500.000 | 39.117.000 | 7,75% |
| 7 | Biaya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 881.543.599 | 782.523.550 | 98.520.049 | 11,12% |
| 8 | Biaya Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 179.225.200 | 174.241.830 | 4.983.370 | 2,78% |
| 9 | Biaya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 134.647.300 | 128.600.000 | 6.047.300 | 4,49% |
| 10 | Biaya Program Perencanaan dan Pengelolaan Hutan | 62.200.000 | 58.900.000 | 3.300.000 | 5,31% |
| 11 | Biaya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | 100.976.000 | 98.500.000 | 2.476.000 | 2,46% |
|  | **Jumlah** | **2.754.158.599** | **2.531.337.229** | **222.321.370** | **8,07%** |

Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

Dari tabel 3.6, dapat dilihat bahwa selisih biaya operasional yaitu program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebesar Rp66.210.201,- program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar -Rp908.350,- program peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar Rp1.975.000,- biaya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah sebesar Rp0,- , biaya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar Rp600.800,- biaya program pengembangan pengelolaan kinerja persampahan adalah sebesar Rp39.117.000,- biaya program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah sebesar Rp98.520.049,- biaya program perlindungan dan konservasi sumber daya alam adalah sebesar Rp4.983.370,- biaya program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebesar Rp6.047.300,- biaya program perencanaan dan pengelolaan hutan adalah sebesar Rp3.300.000,- dan biaya program pengelolaan ruang terbuka hijau adalah sebesar Rp2.476.000,-.

**5. Hasil Uji Paired Sample T-Test**

Paired sample t-test digunakan apabila data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak

**Tabel 3.7 Uji Paired Sample T-Test**

dan Ha diterima. Jika nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Mean** | **t-hitung** | **Sig. (2-tailed)** | **Keterangan** |
| SebelumPandemi– SelamaPandemi | 676520073.222 | 3.668 | .002 | Signifikan |

Sumber : Data Laporan Anggaran dan Realisasi DLH Kab. Mura, 2022

Berdasarkan tabel 3.7, memperlihatkan hasil uji *Paired Sample T-Test* dimana diperoleh nilai sig (2-tailed) sebesar 0,002 < 0,05, itu berarti hipotesis Ha yang menyatakan ada perbedaan pengendalian terhadap anggaran dan realisasi biaya operasional sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas dapat diterima dan Ho ditolak. Demikian dapat dinyatakan bahwa Pandemi Covid-19 mempengaruhi anggaran dan realisasi sebagai alat pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

* 1. **Pembahasan**

1. **Analisis Selisih Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional**
2. **Selisih Biaya Operasional Tahun 2019**

Berdasarkan tabel 3.4, hasil analisis varians di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas diketahui besarnya jumlah anggaran tahun 2019 sebesar Rp7.863.120.000,- realisasi sebesar Rp7.426.839.777,- dan selisih Rp436.280.223,- dengan persentase penyimpangan 5,54%. Hasil analisis selisih biaya operasional diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas mengalami penyimpangan *favorable* atau penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan tidak ada realisasi yang melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

1. **Selisih Biaya Operasional Tahun 2019**

Berdasarkan tabel 3.5, hasil analisis varians di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas diketahui besarnya anggaran tahun 2020 sebesar Rp3.735.488.360, realisasi sebesar Rp3.436.675.354,- dan selisih Rp298.813.006,- dengan persentase penyimpangan 8%. Hasil analisis selisih biaya operasional diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas mengalami penyimpangan *favorable* atau penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan tidak ada realisasi yang melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

1. **Selisih Biaya Operasional Tahun 2019**

Berdasarkan tabel 3.6, hasil analisis varians di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas diketahui besarnya anggaran tahun 2021 sebesar Rp2.754.158.599,- realisasi sebesar Rp2.531.337.229,- dan selisih sebesar Rp222.321.370 ,- dengan persentase peyimpangan 8,07%.

Hasil analisis selisih biaya operasional diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas mengalami penyimpangan *favorable* atau penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan tidak ada realisasi yang melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Tetapi terdapat 1 program yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pada program biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional yang terdapat penyimpangan sebesar -Rp908.350,- yang artinya penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan *unfavorable* atau penyimpangan yang tidak menguntungkan dikarenakan realisasi yang terjadi melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat itu harga onderdil atau peralatan untuk pemeliharaan rutin tersebut naik sehingga realisasi melibihi anggaran yang dibuat.

1. **Pengendalian Kinerja Keuangan terhadap Penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas**

Pengendalian dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi antara apa yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan realisasinya dan menjadi bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

Hasil analisis secara keseluruhan, terlihat bahwa pengendalian terhadap penyimpangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan kegiatan teknis organisasi perangkat daerah yang sudah ditetapkan. Hanya saja dalam penyerapannya belum terserap sepenuhnya karena masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasinya. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya program yang tidak bisa terlaksana atau berjalan dengan baik karena pandemi Covid-19, sehingga anggarannya tidak bisa digunakan seutuhnya. Adanya penurunan nominal anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi hambatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas dalam mengalokasikan dana anggaran untuk tiap-tiap program yang akan dijalankan. Penurunan nominal anggaran disebabkan karena pemerintah daerah mengalokasikan dana tersebut menjadi dana covid ke Dinas yang menangani pandemi Covid-19.

1. **Hasil Analisis Uji Paired Sample T-Test**

Uji Paired Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pengendalian terhadap anggaran dan realisasi biaya opeasional pada masa sebelum dan selama pandemi Covid-19. Hasil uji *Paired Sample T-Test* dengan menggunakan data sebelum pandemi Covid-19 yaitu data anggaran dan realisasi biaya operasional tahun 2019 dan data selama pandemi Covid-19 yaitu data anggaran dan realisasi biaaya operasional tahun 2020 dan 2021, di dapat hasil yaitu nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,002 < 0,05, itu berarti hipotesis Ha yang menyatakan terdapat perbedaan pengendalian terhadap anggaran dan realisasi biaya operasional sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas dapat diterima dan Ho ditolak.

Hal ini dapat dilihat dari terjadinya penurunan nominal anggaran dari sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19, yaitu pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19, anggaran yang diberikan oleh pemerintah adalah Rp7.863.120.000 dan pada tahun 2020 dan 2021 selama terjadi pandemi Covid-19, anggaran yang diberikan pemerintah turun menjadi Rp3.735.488.360 di tahun 2020 dan Rp2.754.158.599 di tahun 2021. Akibat dari penurunan anggaran tersebut, terjadi juga penurunan realisasi khususnya pada program perjalanan dinas ke luar dan dalam daerah. Pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan dengan cara membuat anggaran di awal periode, pada masa sebelum pandemi Covid-19 dapat terserap di seluruh kegiatan atau program yang ada, menjadi tidak dapat terserap sepenuhnya selama pandemi Covid-19 dikarenakan beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam daerah. Demikian dapat dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi anggaran dan realisasi sebagai alat pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

**IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan dan analisis data yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

* + - 1. Hasil analisis selisih biaya operasional pada tahun 2019, 2020 dan 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas mengalami penyimpangan *favorable* atau penyimpangan yang menguntungkan dikarenakan tidak ada realisasi yang melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Tetapi terdapat 1 program pada tahun 2021, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pada program biaya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional yang terdapat penyimpangan sebesar -Rp908.350,- yang artinya penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan *unfavorable* atau penyimpangan yang tidak menguntungkan dikarenakan realisasi yang terjadi melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat itu harga onderdil atau peralatan untuk pemeliharaan rutin tersebut naik sehingga realisasi melibihi anggaran yang dibuat.
      2. Pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan kegiatan teknis organisasi perangkat daerah yang sudah ditetapkan. Hanya saja dalam penyerapannya belum terserap sepenuhnya karena masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasinya. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya program yang tidak bisa terlaksana atau berjalan dengan baik karena pandemi Covid-19, sehingga anggarannya tidak bisa digunakan seutuhnya.
      3. Adanya perbedaan pengaruh pengendalian terhadap anggaran dan realisasi biaya operasional sebelum dan selama pandemi Covid-19 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat dinyatakan bahwa Pandemi Covid-19 mempengaruhi anggaran dan realisasi sebagai alat pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

V**. Daftar Pustaka**

Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi* (1st ed.). PT. Elex Media Komputindo.

*Badan Pusat Statistik*. (2020).

Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, *4*(1), 33–48. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803

Djemma, F. E. U. A. (2021). *Analisis Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada Kantor Wilayah PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Palopo*. http://dx.doi.org/10.31237/osf.io/e24wm

Haryati, A., & Anggreani, R. D. (2019). Penerapan Anggaran Biaya Operasional Dalam Rangka Menilai Kinerja Manajemen Pada PT.Inbisco Niagatama Semesta. *AKUNTOTEKNOLOGI:Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, *2*, 1–8.

Intihanah, Safaruddin, & Dkk. (2021). *EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN (Studi Kasus pada PT Bumi Sarana Beton Cabang Kendari*. *6*, 1–14.

Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *22*(2), 67–89.

Purwanto, H., Yudhyani, E., & Verahastuti, C. (2022). PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Ekonomia*, *12*, 1–11.

Putra, Y. perdana. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA ANGGARAN ASPEK IMPLEMENTASI PADA SATUAN KERJA LINGKUP BPKP RI: ANALISIS PERBANDINGAN. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, *3*(2), 92.

Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, *2*(1), 49. https://doi.org/10.35914/jemma.v2i1.142

Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, *18*(2), 63–78.

Wirataruna, M. N. A. (2021). Analisis Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Pada Sekertariat Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat Tahun 2018-2020. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Ekonomi*, *19*(2), 439–449. http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jbme/article/view/818

Yulisniawati, N. (2018). *ANALISIS ANGGARAN TAHUNAN BIAYA OPERASIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUMATERA UTARA PERIODE 2014-2016*.